

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi, data, serta komunikasi pada era ini terus semakin maju. Semakin bertambah majunya teknologi menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara elektronik serta mampu untuk meningkatkan kinerja birokrasi pada pemerintah. Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju akan meningkatkan efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga mendesak pemerintah melakukan suatu konsep tata pemerintahan yang baik sebagaimana dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) No 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menjadi landasan untuk Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Wilayah dalam melaksanakan reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Eldo & Mutiarin, 2019). Tidak hanya reformasi birokrasi, reformasi administrasi publik di Indonesia pula diperuntukan guna menggapai tata pemerintahan yang baik. Lewat kenaikan profesionalisme aparatur negeri, baik di pusat ataupun di wilayah, supaya sanggup menunjang keberhasilan pembangunan nasional. (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020).

Birokrasi dijelaskan dengan suatu hal yang berhubungan pada aspek-aspek penting seperti dalam aspek kelembagaan, sumber daya alam (SDA), serta pembaruan birokrasi (B. K. Putra et al., 2021). Saat ini, pemerintah pusat maupun

daerah sedang menginisiasi birokrasi yang berbasis digital, dimana hampir seluruh hal yang berkaitan dengan birokrasi telah terdigitalisasi. Bahkan pada saat ini pemerintah daerah sedang berlomba guna meningkatkan dan membenahi kualitas birokrasi digital nya dengan teknologi informasi guna memberikan akses serta pelayanan yang lebih baik lagi. Maka dari itu *smart bureaucracy* merupakan upaya dilakukan pemerintah pada sektor pelayanan publik yang didukung dengan adanya teknologi informasi yang fungsinya mengirimkan informasi serta pelayanan secara daring melalui internet ataupun media digital lain guna membagikan dan menginformasikan kebijakan pemerintah agar terwujudnya tata kelola yang lebih baik serta mempersingkat birokrasi yang ada selama ini. Dalam penerapan *smart bureaucracy* ini sangat penting dalam memberikan pelayanan berbasis digital kepada warga agar meningkatkan efisien, efektif, serta transparan kepada warga atau masyarakat serta pemberian umpan balik atau *feedback* oleh masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang telah diberikan oleh birokrasi (Bachtiar et al., 2020).

Pada perkembangan teknologi yang serba digital ini banyak pemerintah wilayah yang terus tingkatkan inovasi baik inovasi dalam perihal pembangunan wilayah ataupun dalam perihal pelayanan publik lewat *e-government*. *E-government* dilakukan oleh *United Nation Public Administration Network (UNPAN)* dengan meliputi 3 komponen evaluasi atau penilaian yaitu, penggunaan layanan online, infrastruktur telekomunikasi, serta sumber daya manusia, dengan hasil akhirnya adalah indeks *e-government* untuk setiap negeri (Mutiarin & Wijaya, 2017). Lewat *e-government* segala lembaga-lembaga negeri, dunia usaha,

warga serta pihak-pihak berkepentingan yang lain bisa setiap waktu menggunakan data serta layanan pemerintah secara maksimal (Wahyuningsih & Purnomo, 2020).

*E-government* adalah wujud implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi data serta komunikasi, selaku media data serta komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok warga, golongan bisnis ataupun antar sesama lembaga pemerintahan. Tujuan dari *e-government* berguna untuk mencapai reformasi yang mendorong proses kerja dalam pemerintahan menjadi lebih simpel, lebih akurat, penghapusan jarak, memberdayakan orang guna terlibat dalam proses politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, *responsive* serta membentuk pemerintahan yang transparan (Ibrahim, 2021). Implementasi *e-government* dalam pelaksanaannya diawali dari wujud layanan yang simpel adalah penyediaan data serta data-data berbasis komputer tentang penerapan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan selaku wujud bentuk keterbukaan (*transparancy*) dalam penerapan pelayanan publik (Rubiyanto, 2019).

Di Indonesia, *e-government* dilaksanakan setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Inpres ini dibuat guna menyamakan pemikiran Pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya sehingga terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, serta efektif serta terdapatnya pelibatan partisipasi warga dalam pemerintahan. Sejak Inpres tersebut disahkan, pergantian demi pergantian mulai terbentuk (Mochammad Rozikin a, Wa Hesty b,

2020). Terdapat juga Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Wilayah, dimana dalam penyelenggaraan otonomi wilayah dilakukan dengan menyerahkan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab kepada wilayah. Supaya penerapan pemerintahan serta pembangunan tersebut betul-betul mempunyai manfaat dalam waktu jangka panjang untuk warga luas, penerapan pemerintahan serta pembangunan itu sendiri membutuhkan sesuatu upaya keberlanjutan serta kesinambungan (Rubiyanto, 2019).

Imania dan Haryani (2018) menerangkan bahwa *e-government* hendak melakukan perubahan pada tatanan birokrasi yang kaku menjadi lingkungan yang dinamis guna memfasilitasi bermacam wujud interaksi dengan pihak lain. Dalam proses ini, pemerintah bisa memaksimalkan pemanfaatan TIK guna mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, dan membuat jaringan sistem manajemen serta proses kerja yang membolehkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu guna menyederhanakan akses ke semua data serta layanan publik yang wajib disediakan supaya bisa terwujud *good governance*. Ada pula sebagian aspek yang berfungsi dalam mensukseskan penyelenggaraan *e-government*, adalah ketersediaan sumber energi manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan regulasi yang komprehensif.

Salah satu kota yang mempraktikkan pelayanan publik berbasis *e-government* adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang mana perihal ini dibuktikan dengan adanya implementasi Peraturan Walikota No 15 Tahun 2015 yang berisi roadmap pengembangan *e-government* dalam tatanan kota Yogyakarta (Novriando & Purnomo, 2020). Pemerintah DIY sudah meningkatkan website

yang bernama Dataku ataupun e-data yang mana aplikasi dataku ini termuat perihal-perihal spesial tentang zona-zona pembangunan di DIY sepanjang 5 tahun terakhir(2015-2020). Dataku merupakan bentuk dari satu informasi pembangunan yang terdapat di DIY. Pembangunan di tiap wilayah Provinsi, Kabupaten, serta Kota merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dalam tiap tahun pemerintah melaksanakan bermacam-macam program serta aktivitas guna meningkatkan berbagai sektor serta kemampuan di tiap-tiap daerah. Untuk melindungi supaya proses pembangunan ini memperoleh capaian yang di idamkan maka diperlukan suatu perlengkapan bantu untuk memonitor, mengevaluasi serta menginformasikan hasil pembangunan dari waktu ke waktu.

Pada Aplikasi di dalam Dataku disediakan informasi serta data terkini yang lebih lengkap sehingga sanggup menunjukkan dinamika yang terjalin di kabupaten/kota dan pastinya mencari pemecahan atau solusi pengendaliannya. Tidak cuma pemerintah saja, tetapi warga juga bisa dengan mudah mengakses aplikasi ini. Aplikasi Dataku dikembangkan ke dalam bermacam fitur, baik berbasis website ataupun aplikasi di smartphone. Sampai saat ini ada ribuan informasi perencanaan pembangunan yang sudah terdokumentasi oleh aplikasi Dataku DIY. Lewat tampilan Informasi Utamanya, ada kumpulan informasi yang disortir serta dipilih bersumber pada volume pencarian paling banyak, sehingga warga lebih dimudahkan dalam mengakses data-data yang sangat kerap diperlukan. Tampilan Informasi Utama ini dikelompokan bersumber pada bidang urusan dengan mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Wilayah. Tampilan informasi utama disajikan dalam wujud grafik

supaya data yang diinformasikan lebih ringkas serta mudah untuk dipahami dalam waktu yang singkat.

Dalam monitoring serta penilaian terhadap kinerja pemerintah wilayah tidak hanya dari otoritas pusat namun pula mengaitkan warga selaku lini masa yang sangat merasakan hasil dari kinerja tersebut. Sesuai Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik, Pemda DIY menunjang serta mempersilahkan warga buat turut mengawasi, mengawal, serta memperhitungkan kinerja pemerintah DIY. Informasi Indikator Kinerja Pemda menunjukkan laporan kinerja pemerintah DIY dalam melaksanakan bermacam aktivitas pelayanan serta pembangunan berdasarkan Informasi Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari RPJMD. Lewat data ini pula warga bisa memandang secara global tolak ukur keberhasilan perencanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang Aplikasi Dataku merupakan masalah utama dalam penerapan *e-government* ini. Karena tidak semua masyarakat mengetahui Aplikasi Dataku, disebabkan belum sepenuhnya masyarakat mengenal tentang *e-government*. Selain itu juga respon masyarakat terhadap Aplikasi Dataku masih kurang. Permasalahan lainnya adalah BSD Bappeda DIY terus berusaha melakukan pengembangan Aplikasi Dataku agar memiliki fitur dan teknologi yang lengkap.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut disebabkan pemanfaatan teknologi di era sekarang sangat penting untuk pemerintahan agar meningkatkan efisien, efektivitas, transparansi,

akuntabilitas, dalam birokrasi sehingga terwujudnya suatu konsep tata pemerintahan yang baik. Maka dari itu, penelitian ini berguna mengetahui penerapan Aplikasi Dataku dalam perspektif *smart bureaucracy* untuk monitoring dan evaluasi pembangunan DIY agar Aplikasi Dataku kedepannya semakin berkembang dalam hal menyediakan data-data tentang pembangunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana penerapan Aplikasi Dataku dalam perspektif *smart bureaucracy*?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Aplikasi Dataku oleh Pemerintah BAPPEDA DIY?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Aplikasi Dataku dalam perspektif *smart bureaucracy*
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Aplikasi Dataku oleh Pemerintah BAPPEDA DIY.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi disiplin ilmu sosial dan politik serta bermanfaat bagi pembaca

untuk memahami informasi penerapan *e-government* dalam Aplikasi Dataku.

2. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam hal penerapan *smart bureaucracy* dalam *e-government* pada Aplikasi Dataku ataupun dimanfaatkan sebagai referensi dalam kasus penelitian yang serupa atau untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan terwujudnya *check and balance* antara pemerintah dengan masyarakat dan pengguna dari Aplikasi Dataku, serta juga mampu mendukung proses pengolahan data yang lebih baik agar data-data tentang pembangunan di Aplikasi Dataku akurat.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan respons masyarakat terhadap Aplikasi Dataku.
3. Adanya penelitian ini memberikan pedoman tentang penggunaan Aplikasi Dataku.
4. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa pengetahuan dan wawasan baru mengenai *smart bureaucracy* dalam *e-government* pada Aplikasi Dataku guna monitoring dan evaluasi pembangunan DIY. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir strata 1.



item kata “*bureaucracy, government*”, information berada pada tahun 2015 hingga 2016. Kemudian, *default* warna biru memiliki item kata “*technology, process, term, future, policy*” yang berada pada tahun 2016 hingga 2017. Selanjutnya, *default* warna hijau dengan item “*development, city, lack*” berada pada tahun 2018. *Default* warna kuning memiliki item “*smart city, blockchain*” berada pada tahun 2019.

*Default* warna ungu di atas memiliki dominan kata dan node yang paling besar yaitu *bureaucracy, government, information* yang merupakan pembahasan yang paling sering dijadikan penelitian. Dengan demikian kajian terkait “*smart bureaucracy*” merupakan kajian yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam seiring dengan teknologi serta kajian dan analisisnya.

*Smart bureaucracy* merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan dan menggunakan IT guna memberikan peningkatan pelayanan publik agar memuaskan masyarakat serta memberikan pelayanan prima agar terwujudnya pemerintah yang efisien, efektifitas, partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Konsep dari *smart bureaucracy* yaitu menggunakan teknologi yang dihubungkan dengan infrastruktur informasi pemerintah dengan segala yang digital.

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan *E-Government* di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Hidayat (2017) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Penerapan Kriteria REESI Sebagai Assessment Tools Monitoring dan Evaluasi**

**Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia** menjelaskan tentang *Assesment Tools* pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang harus disusun sebagai langkah awal pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang tujuannya mendapatkan fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan untuk dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dalam keberlangsungan untuk kesuksesan dan berhasilnya perencanaan diterapkan kriteria *REESI (Relevansi, Efektivitas, Efisiensi, Sustainable, dan Impact)* sebagai *assessment tool* dalam melakukan monitoring dan evaluasi. *Relevansi* berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai. *Efektivitas* merupakan kriteria yang akan dicapai dalam setiap tingkatannya. *Efisiensi* memilah agar mendapatkan hasil yang sesuai atau sumber daya yang digunakan seimbang dengan hasil yang dicapai. Keberlanjutan atau *Sustainable* dimana kita harus memikirkan keberlanjutan dari seluruh proses perencanaan. *Impact* atau dampak yaitu perkiraan yang akan timbul dari perencanaan itu sendiri.

Alfiah (2019) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Pengaruh Penerapan *E-Government* Pada Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sumenep** menjelaskan tentang implementasi *e-government* yang ada di Kabupaten Sumenep yang telah dimulai tahun 2002 mengambil langkah dengan penerapan *e-government* melalui *g-online*. Selain itu, pada tahun 2014 Kabupaten Sumenep mencanangkan Sumenep *Go Smart city* dan tahun 2017 menuju *smart city*. Kabupaten Sumenep masuk dalam 50 kota terpilih untuk pengembangan *smart city* oleh Kementerian KOMINFO Kabupaten Sumenep pada tahun 2017. Ketika Kabupaten Sumenep terpilih bukan hal yang mudah untuk menjadi bagian

dari program *smart city* disebabkan ada parameter harus dipenuhi yaitu kondisi keuangan daerah itu sendiri, peringkat dan status kinerja penyelenggara pemda, indeks kota berkelanjutan, dan dimensi pembangunan pemerataan. Selanjutnya dikembangkan *smart city* sebagai jawaban dari perkembangan *e-government* di daerah. Landasan dari pembangunan *smart city* tidak lepas dari pengaruh pelaksanaan *e-government*.

Hamrun et al (2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis *E-Government* di Kabupaten Muna** menjelaskan tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan *e-government* dimulai dengan meliputi :

1. Persiapan yaitu : membuat dokumen perencanaan, membuat website, *blueprint smart city*, mengembangkan jaringan infrastruktur telekomunikasi dasar dan pendekatan dengan pihak swasta
2. Pematangan meliputi sinkronisasi kebijakan 1 data ke seluruh OPD dan pelaksanaan sosialisasi
3. Pemantapan : Pemda Kabupaten Muna menyiapkan ASN khusus di Kabupaten Muna guna memahami, mengetahui, dan menyiapkan diri agar dapat melayani masyarakat kabupaten Muna dengan menggunakan pelayanan berbasis *e-government*.
4. Pemanfaatan ini digunakan supaya masyarakat mampu memanfaatkan kemudahan akses pelayanan di seluruh OPD.

Mait et al (2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Analisis Penerapan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di BAPPEDA Provinsi Sulut)** menjelaskan bahwa pada sistem penerapan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan BAPPEDA sulut perlu memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. SDM sangat berperan penting yang berguna untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam mengolah sistem *e-planning* agar berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari berbagai sasaran yang ingin dicapai.
2. Adanya masalah pada system *e-planning* pada perencanaan pembangunan daerah yaitu belum adanya kepastian hukum pada system *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Sulut.
3. Pada penerapan *e-planning* harus diperhatikan kesiapan anggaran, disebabkan banyaknya keterlibatan pihak yang ada, namun anggaran yang ada belum bisa untuk pembiayaan penerapan sistem *e-planning*. Tetapi BAPPEDA Sulut akan mengoptimalkannya tentang masalah ini agar penerapan *e-planning* bisa berjalan dengan baik.

Suriyani (2018) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Implementasi Penyelenggaraan *E-Government* (Studi Kasus Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017)** menjelaskan tentang perkembangan *e-government* di Kabupaten Tabalong belum berjalan dengan baik dan belum mengacu pada dokumen Rencana Induk *E-Government* Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2016-2020. Adanya faktor penghambat pelaksanaan *e-government* yaitu

terhambatnya faktor individu, pada pengembangan aplikasi kurang dalam perencanaan dan koordinasi antar SKPD sehingga pada pembelian aplikasi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara optimal. Terdapatnya anggaran yang minim dan belum adanya kontrak setelah instalasi dari pengembangan sistem informasi, juga belum terdapatnya lembaga yang mengkaji secara khusus tentang arah perkembangan penyelenggaraan e-government secara baku. Solusi dari pelaksanaan e-government di Kabupaten Tabalong dengan menyediakan prasarana dan sarana jaringan komputer yang memadai di setiap SKPD, dan dukungan data yang harus akurat dan terbaru yang dapat diakses ke semua pihak yang membutuhkan. Selain itu memerlukan waktu dan usaha dalam menghadapi tantangan dan kendala dengan terus berfokus, konsisten, dan komitmen pada jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dionisia Mariani et al (2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam Penerapan *E-Government*** menjelaskan tentang adanya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan pemerintah di Kabupaten Manggarai dalam penerapan *e-government* sebagai berikut :

1. Tidak adanya kerangka hukum yang mengatur penerapan *e-government* di Kabupaten Manggarai
2. Komitmen pada pemerintahnya masih rendah untuk penerapan *e-government*
3. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Manggarai belum maksimal

4. SDM yang belum memadai
5. Minimnya anggaran untuk *e-government*

Maka dari itu pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Manggarai perlu dioptimalkan dengan dibuatnya payung hukum yang jelas untuk mengatur tentang *e-government*. Dalam penerapan *e-government* perlu alokasi anggaran khusus dan juga adanya pelatihan SDM.

Yunas (2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Implementasi E-Government Dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour Pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya** menjelaskan tentang praktek perburuan *rente* (*rent seeking behaviour*) yang merupakan praktik konspirasi antara pengusaha serta pemerintah ataupun birokrasi yang rentan untuk penyalahgunaan wewenang dan dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. Maka dari itu permasalahan *rent seeking behaviour* akan segera dituntaskan supaya masyarakat mendapatkan haknya dalam pelayanan yang berkualitas dan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada organisasi birokrasi. Caranya melalui transformasi teknologi informasi pada pemerintahan (*e-government*) yang ada di Kota Surabaya dalam berbagai bidang mulai dari *Emusrembang*, *Surabaya Single Window*, *Eprocurement*, *Surabaya Tax*, *Citizen Centric*. Transformasi yang dilakukan besar-besaran ini mampu mengurangi potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat *koruptif* sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(Sijabat, 2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Analysis of E-Government Services : A Study of the Adoption of Electronic Tax Filing in Indonesia* menjelaskan tentang penggunaan aplikasi tentang sistem pelaporan pajak tahunan (*e-filing*) yang mengeksplorasi dampak dari manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan risiko yang dirasakan. Penerapan *e-filing* di Indonesia dipengaruhi oleh persepsi pengguna tentang penggunaannya. Jika individu termotivasi menggunakannya maka dia akan mengajak orang lain untuk menggunakannya. Kemudahan penggunaan dipengaruhi oleh indikator dari keinginan pengguna untuk menggunakan teknologi sebagai tujuan yang dimaksudkan. Risiko kinerja saat menggunakan *e-filing* mengacu pada situasi dimana konsumen takut layanan online tiba-tiba berhenti berfungsi.

Fikri et al (2018) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Utilization of Electronic Government in Realizing Transparency and Accountability of Village Government : Synergy of Implementation of Electronic Village Budgeting and Electronic Monitoring System by Banyuwangi Government* menjelaskan tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan teknologi *electronic governance* guna melakukan inovasi pada pengawasan pengelolaan keuangan desa agar akuntabel dan transparan. Inovasi tersebut yaitu *electronic village budgeting* dan *electronic monitoring system*. Kegunaan aplikasi tersebut untuk memudahkan pemerintah dalam mengelola dana desa dan juga menciptakan prestasi. Pemerintah mendapatkan prestasi sebagai 99 TOP inovasi dan 40 inovasi yang dikeluarkan oleh menteri

negara guna pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Maka dari itu, pemerintah Banyuwangi menjadi *pilot project* menteri negara untuk pemberdayaan aparatur negara dan akan mengarah ke desa pintar.

Radiansyah (2020) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul **Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance* Melalui Kerangka Otonomi Daerah** menjelaskan tentang reformasi birokrasi yang diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat belum menunjukkan upaya dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena korupsi pejabat aparatur sebagai implikasinya dan para pegawai aparatur di lingkungan kerja belum menunjukkan hasil yang optimal dan baik. Selanjutnya, hasil akuntabilitas kinerja yang perlu untuk ditingkatkan lagi serta hasil survei internal kapasitas aparatur yang belum menunjukkan hasil capaian yang optimal sebagaimana representasi dari kompetensi aparatur yang layak. Dalam permasalahan tersebut sumber daya aparatur menjadi kendala utama, kemudian pengaruh lingkungan dan budaya birokrasinya.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya umumnya membahas tentang penerapan *e-government*. Penelitian penulis berfokus pada suatu inovasi *e-government* pada Aplikasi Dataku dalam perspektif *smart bureaucracy* serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Aplikasi Dataku oleh BAPPEDA DIY.

**Tabel 1.5 Penelitian sebelumnya terkait dengan E-Government**

Peneliti	Judul	Hasil
(Hidayat, 2017)	Penerapan Kriteria <i>REESI</i> Sebagai <i>Assessment Tools</i> Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia	Dalam keberhasilan perencanaan pembangunan diterapkan prinsip <i>REESI</i> yaitu <i>Relevansi</i> (tujuan yang dicapai), <i>Efektivitas</i> (menetapkan kriteria yang hendak dicapai), <i>Efisiensi</i> (mendapatkan hasil yang optimal), <i>Sustainable</i> (keberlanjutan), <i>Impact</i> (dampak)
(Alfiyah, 2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Government</i> Pada Pembangunan <i>Smart City</i> di Kabupaten Sumenep	Pengaplikasian <i>E-Government</i> di Kabupaten Sumenep sesuai dengan Inpres Nomor 3 tahun 2003 meluncurkan program <i>g-online</i> . Selanjutnya dengan seiringnya perkembangan zaman pemerintah mengambil pembaruan dengan lahirnya pembangunan untuk <i>smart city</i> untuk pelaksanaan <i>e-government</i> di Kabupaten Sumenep
(Hamrun et al., 2020)	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis <i>E-Government</i> di Kabupaten Muna	Pemerintah Daerah melakukan upaya pelayanan berbasis <i>e-government</i> dengan strategi dalam pengembangan program yang mengikutsertakan SDM dan teknologi informasi.
(Mait et al., 2020)	Analisis Penerapan Sistem <i>E-Planning</i> Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di BAPPEDA Provinsi Sulut)	Penerapan sistem <i>e-planning</i> yang belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya <i>efisien</i> dalam hal waktu karena banyaknya OPD yang tidak memasukkan data dengan tepat waktu. Terdapatnya SDM yang kurang berkualitas sehingga membuat pemasukan data jadi terhambat. Terdapatnya juga belum ada peraturan daerah atau kepastian hukum yang dapat menunjang penerapan sistem <i>e-planning</i> . Diharapkan untuk BAPPEDA Sulut membuat Perda tentang <i>e-</i>

		<i>planning.</i>
(Suriyani, 2018)	Implementasi Penyelenggaraan <i>E-Government</i> (Studi Kasus Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017)	Perkembangan <i>E-Government</i> di Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapatnya hambatan kultural individu, pengembangan aplikasi kurang perencanaan dan koordinasi antar SKPD sehingga jarang aplikasi di manfaatkan secara optimal, selain itu juga anggaran masih minim dan tidak adanya kontrak <i>after installation</i> dari pengembang sistem informasi dan belum adanya lembaga yang mengkaji secara khusus tentang arah perkembangan dan standar ataupun spesifikasi pengembangan sistem <i>e-government</i> secara baku. Solusinya yaitu menyediakan sarana dan prasarana jaringan di setiap SKPD serta dukungan data yang akurat sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh SKPD yang terkait.
(Dionisia Mariani et al., 2020)	Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam Penerapan <i>E-Government</i> .	Dalam penerapan <i>e-government</i> pemerintahnya belum komitmen, belum maksimal pemanfaatan TIK, SDM dan sarana dan prasarana untuk pendukung <i>e-government</i> belum memadai, dan minimnya anggaran. Solusi untuk mengoptimalkan penerapan <i>e-government</i> di Kabupaten Manggarai dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penyediaan sumber daya yang mendukung guna terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang efisien, efektif, dan transparan.
(Yunas, 2020)	Implementasi <i>E-Government</i> Dalam Meminimalisasi Praktik <i>Rent Seeking Behaviour</i> Pada Birokrasi	Praktik <i>rent seeking behaviour</i> merupakan praktik konspirasi antara pengusaha dengan pemerintah atau birokrasi yang menimbulkan tindakan yang penyalahgunaan wewenang dan bersifat <i>koruptif</i> . Praktik

	Pemerintah Kota Surabaya	ini segera dituntaskan dengan melakukan transformasi teknologi informasi atau <i>e-government</i> agar masyarakat memperoleh haknya dalam pelayanan yang berkualitas
(Sijabat, 2020)	<i>Analysis of E-Government Services : A Study of the Adoption of Electronic Tax Filing in Indonesia</i>	Penggunaan aplikasi tentang sistem pelaporan pajak tahunan ( <i>e-filing</i> ) yang mengeksplorasi dampak dari manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan risiko yang dirasakan. Manfaat dan resiko <i>e-filing</i> secara signifikan berkaitan dengan niat untuk menggunakan. Persepsi kemudahan penggunaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan meskipun pengaruh risiko yang dirasakan secara signifikan memediasi pengaruh manfaat yang dirasakan, itu tidak secara signifikan memediasi pengaruh kemudahan penggunaan. Gender ditemukan secara signifikan memoderasi pengaruh persepsi kegunaan <i>e-filing</i> , tetapi tidak memoderasi pengaruh persepsi kemudahan penggunaan
(Fikri et al., 2018)	<i>Utilization of Electronic Government in Realizing Transparency and Accountability of Village Government : Synergy of Implementation of Electronic Village Budgeting and Electronic Monitoring System by Banyuwangi Government.</i>	Pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Banyuwangi menciptakan inovasi baru dalam pengelolaan dana desa berupa aplikasi EVB dan EMS yang bertujuan guna mengawasi dan mengelola dana desa di Kabupaten Banyuwangi.

<p>(Radiansyah, 2020)</p>	<p>Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i> Melalui Kerangka Otonomi Daerah.</p>	<p>Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melalui praktik otonomi daerah masih belum menunjukkan tanda-tanda yang optimal dalam mewujudkan <i>good governance</i>. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas sumber daya aparatur serta hal lain yang sifatnya <i>mimetic</i> dan <i>koersif</i> yang juga ikut mempengaruhi mentalitas aparatur negara secara keseluruhan berdasarkan pengaruh pimpinan, lingkungan dan budaya birokrasi.</p>
---------------------------	---	--

## **1.6 Kerangka Teoritik**

### 1.6.1 Smart Bureaucracy

*Smart Bureaucracy* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan IT untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, dekat dengan masyarakat, efektif biaya. Dalam perkembangan IT yang cepat menjadi peluang dalam percepatan penerapan *e-governance* sebagai digitalisasi data dan informasi seperti e-government yang dapat memberikan layanan yang efektif, efisien, transparan kepada warga negara (A.H Rahadian, 2019). Adanya *smart bureaucracy* ini terciptanya sistem yang transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat melalui terbukanya berbagai informasi agar masyarakat mau untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan birokrasi. Partisipasi ini berguna dalam hal efisiensi pelayanan publik serta kontrol bagi jalannya birokrasi (Bachtiar et al., 2020).

*Smart bureaucracy* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta membuat inovasi pelayanan publik yang berguna merancang dan menata penyelenggaraan pemerintah kearah lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Birokrasi sendiri harus senantiasa dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit agar menghasilkan birokrasi yang profesional dan terbebas dari hambatan (B. K. Putra et al., 2021). Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah ataupun pusat

merevisi sistem birokrasi mereka untuk menyediakan akses layanan online untuk publik dengan pemanfaatan teknologi informasi guna terciptanya tata kelola yang lebih baik (*good governance*), bersih dari segi transparan dan akuntabilitas publik. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan proses interaksi dan antusiasme masyarakat pada pelayanan publik, dan terciptanya sistem yang lebih efisien serta lebih interaktif (J. A. Putra, 2020). *Smart bureaucracy* merupakan pemanfaatan IT sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi dengan komputer secara cepat guna merancang organisasi dalam birokrasi dalam pengambilan keputusan yang efektif, efisien yang didukung oleh file atau data, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab. Maka dari itu, perubahan teknologi pada pemerintah difokuskan pada penyampaian layanan elektronik (Vogl et al., 2020).

### 1.6.2 E-Government

Pelaksanaan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 terkait Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di Indonesia, dimana di dalam Inpres tersebut *e-government* merupakan suatu inovasi dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang tujuannya guna mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka tingkatan mutu pelayanan public secara efisien serta efektif. Sementara itu, menurut Alfiyah, (2019) *e-government* merupakan pemakaian internet guna melakukan urusan pemerintah serta penyediaan pelayanan publik yang lebih baik serta metode yang berorientasi pada pelayanan warga.

*E-government* merupakan penggunaan teknologi data serta telekomunikasi guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif serta efisien, dan memberikan pelayanan yang transparan serta memuaskan warga. Singkatnya, salah satu tujuan dari *e-government* merupakan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik. Dimana, dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah guna memberikan birokrasi yang baik (Imania & Haryani, 2018). Selain itu, Pengembangan sistem *e-government* pastinya guna meningkatkan kesejahteraan warga. Pengembangan *e-government* dibuat serta dinikmati oleh seluruh golongan warga dan bisa diakses kapan saja. *E-government* bisa jadi fasilitas untuk warga dalam memberitahukan keluhan ataupun kekurangan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Lewat perihal itu, hingga kedudukan warga dalam proses pembuatan ataupun penerapan sesuatu program pemerintah sangat dibutuhkan. Perihal ini pasti saja supaya pemerintahan terus menjadi transparan, bermutu serta meningkatkan kinerja pemerintah (Situmorang, 2021).

Tujuan dari pengembangan *e-government* diantaranya (Wirawan, 2020) :

- a) Terbentuknya jaringan data serta transaksi pelayanan publik yang mempunyai mutu dan lingkup yang bisa memuaskan warga secara luas dan bisa terjangkau di segala daerah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh waktu serta dengan anggaran yang terjangkau oleh masyarakat.
- b) Penyusunan jalinan interaktif dengan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional serta

menguatkan keahlian menghadapi transformasi serta persaingan perdagangan internasional.

- c) Pembuatan mekanisme serta saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negeri dan penyediaan sarana diskusi publik untuk warga supaya bisa berpartisipasi dalam formulasi kebijakan negeri.
- d) Pembuatan sistem manajemen serta proses kerja yang transparan serta efektif dan memperlancar transaksi serta layanan antar lembaga pemerintah dan serta pemerintah wilayah otonom.

### 1.6.3 Monitoring

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 monitoring adalah sesuatu aktivitas mengamati secara seksama sesuatu kondisi ataupun keadaan, termasuk pula sikap ataupun aktivitas tertentu, dengan tujuan supaya seluruh informasi masukan maupun data yang diperoleh dari hasil pengamatan bisa menjadi landasan dalam pengambilan keputusan tindakan berikutnya yang dibutuhkan. Tindakan tersebut dibutuhkan seandainya hasil pengamatan membuktikan terdapatnya perihal ataupun keadaan yang tidak cocok dengan yang direncanakan semula. Dengan begitu monitoring merupakan suatu aktivitas mengamati perkembangan penerapan suatu program, mengenali serta mengantisipasi permasalahan yang muncul maupun yang hendak muncul agar bisa diambil tindakan sedini mungkin.

Monitoring merupakan kegiatan guna mengidentifikasi apakah program yang dibuat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan dan indikator keluaran, apakah terdapat hambatan yang terjalin dan gimana para pelaksana program kerjasama mampu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap kegiatan yang lagi berlangsung yakni merupakan langkah pengendalian yang baik dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu program (Hidayat, 2017). Sementara itu, menurut Ellien dan Marini, (2018) Monitoring merupakan proses pengumpulan serta analisis data (bersumber pada indikator yang ditetapkan) secara sistematis serta konteksnya tentang aktivitas program/proyek sehingga bisa dilakukan aksi koreksi guna penyempurnaan program/ proyek berikutnya. Menurut Jaya et al (2018) Monitoring merupakan penilaian yang skematis serta terus menerus terhadap kemajuan suatu pekerjaan. Monitoring bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi atau upaya pemecahannya.

#### 1.6.4 Evaluasi

Menurut William Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :

- a) Efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

- b) Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan guna menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c) Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi
- d) Pemerataan berkenaan dengan biaya manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
- e) Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f) Ketepatan berkenaan dengan hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai.

Menurut Ellien dan Marini (2018) Evaluasi merupakan penilaian berkala terhadap relevansi, evaluasi, efisiensi. Evaluasi umumnya terfokus pada dampak dan sustainabilitas. Menurut Jaya et al (2018) Evaluasi ditunjukkan guna mengatur serta mengendalikan ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai untuk memberikan cerminan tentang manfaat suatu kebijakan.

Evaluasi merupakan suatu proses mengidentifikasi tujuan/kriteria dari suatu program kebijakan yang hendak dievaluasi lewat kegiatan pengumpulan data yang cocok serta relevan terhadap objek evaluasi, sehingga diperoleh data/informasi yang bisa diolah dan bisa bermanfaat guna menyusun kesimpulan

dan menghasilkan sesuatu penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang sebagai bentuk rekomendasi (Suryani, 2011). Tujuan evaluasi yaitu guna mengenali apakah program tersebut mencapai sasaran yang diharapkan ataupun tidak dan lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi dapat dilakukan bila suatu program sudah berjalan paling tidak dalam suatu periode ataupun tahapan yang sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan serta dilaksanakan (Hasbullah & Anam, 2019)

### **1.7 Definisi Konseptual**

1.7.1 *Smart Bureaucracy* adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi.

1.7.2 *E-government* adalah pemanfaatan teknologi data yang berupa informasi oleh pemerintah guna membagikan data informasi serta pelayanan untuk warganya secara lebih efektif.

1.7.3 *Monitoring* adalah kegiatan mengamati perkembangan suatu program yang terbuat berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

1.7.4 *Evaluasi* adalah kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.

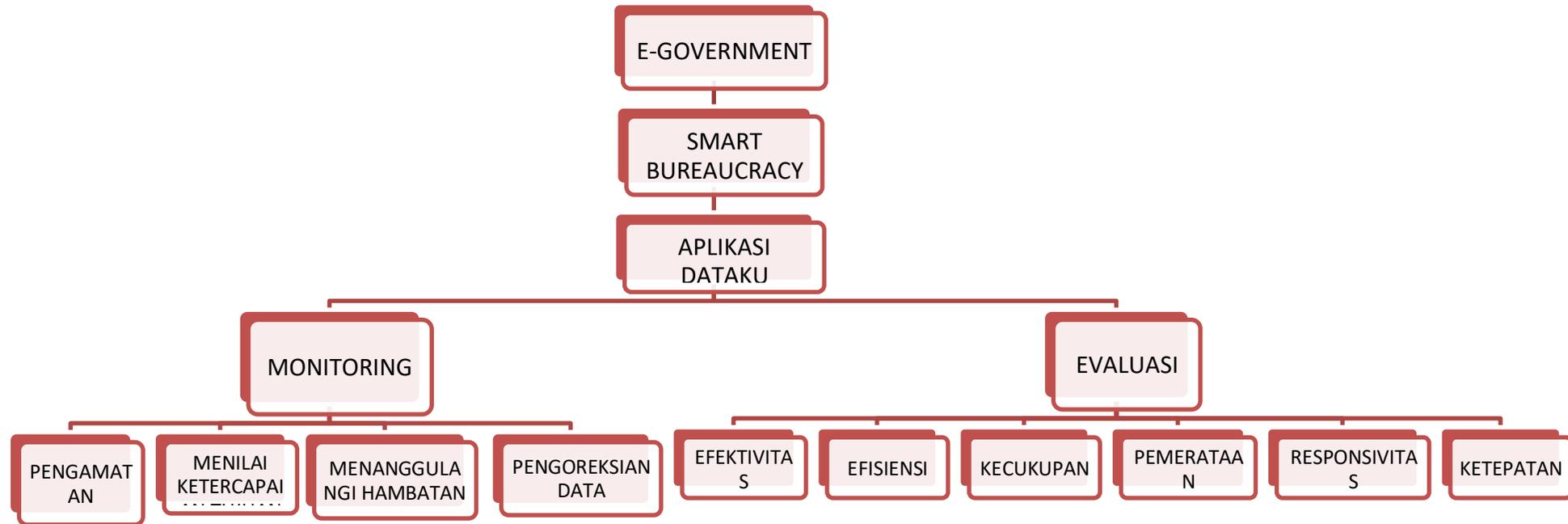
## 1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.8 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
<i>Smart Bureaucracy</i> dalam <i>E-government</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa layanan elektronik</li><li>2. Pengambilan keputusan yang cepat dan efektif dan efisien untuk pengiriman layanan kepada masyarakat.</li><li>3. Merancang proses pengambilan keputusan secara tepat waktu, serta transparan</li></ol>
Monitoring	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengenali dan mengamati apakah program <i>e-government</i> pada pemanfaatan aplikasi dataku berjalan dengan baik.</li><li>2. Menilai ketercapaian tujuan dari pemanfaatan aplikasi dataku.</li><li>3. Melihat faktor pendukung dan penghambat program pemanfaatan aplikasi dataku.</li><li>4. Proses pengumpulan data dan analisis data yang bersumber pada indikator yang sudah ditetapkan untuk dikoreksi guna penyempurnaan program berikutnya.</li></ol>
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Efektivitas : tercapainya tujuan yang telah ditetapkan</li><li>2. Efisiensi : sebuah tindakan atau usaha mengenai penghematan biaya, tenaga, dan waktu untuk mendapatkan hasil yang sesuai.</li><li>3. Kecukupan : seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi</li><li>4. Pemerataan : berkenaan dengan biaya manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.</li><li>5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu</li><li>6. Ketepatan : hasil ataupun tujuan yang diinginkan benar dapat berguna dan bernilai.</li></ol>

## 1.9 Kerangka Pikir

Gambar 2.5 Kerangka Pikir dalam penelitian



## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanto, Atmojo, 2020) penelitian kualitatif merupakan menafsirkan suatu kenyataan kehidupan beserta penyelesaiannya secara lebih mendalam serta *komprensif*. Penelitian kualitatif umumnya mengaitkan beberapa fakta empiris/informasi lapangan yang menggambarkan kejadian-kejadian alamiah serta problematis beserta makna arti kehidupan tiap manusia itu. Dalam penelitian kualitatif, ada lima pendekatan yang umumnya digunakan yaitu naratif, fenomenologis, *grounded theory*, *etnografis*, dan studi kasus. Dari kelima pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena sangat relevan dengan topik yang diambil. Secara definitif, penelitian studi kasus/permasalahan merupakan sebuah penelitian intensif yang mengkaji satu kasus/permasalahan ataupun lebih dalam kehidupan nyata kekinian guna tujuan tertentu yang mana pengumpulan informasi mengaitkan bermacam sumber informasi/data seperti wawancara, dokumentasi, observasi, audiovisual, laporan, dan arsip.

### **1.10.2 Lokasi Penelitian**

Adapun tempat penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kepatihan, Jl. Malioboro, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213. Alasan memilih tempat ini sebagai lokasi

penelitian dikarenakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### 1.10.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian, data primer didapatkan dengan wawancara dari berbagai pihak dan pengamatan langsung di lapangan yaitu mulai dari pimpinan teratas sampai kepada pegawai BAPPEDA DIY mengenai proses monitoring dan evaluasi pada Aplikasi Dataku untuk pelaksanaan pembangunan DIY.
2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung guna mendukung penulisan pada penelitian ini yang mana melalui dokumen maupun catatan yang sudah ada serta artikel ilmiah, jurnal dari berbagai sumber media, serta arsip-arsip resmi yang gunanya untuk mendukung data primer yang senantiasa berkaitan dengan pemanfaatan *e-government* untuk monitoring dan evaluasi pembangunan DIY.

#### 1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dari pihak

terkait seperti dokumen, arsip, atau data oral dari narasumber (Al-Hamdi, Sakir, Suswanto, Atmojo, 2020). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi terkait dengan pemanfaatan aplikasi Dataku untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan DIY.

#### 1.10.4.1 Wawancara

Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanto, Atmojo, (2020) wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung tatap muka atau luring atau bisa juga secara daring menggunakan Zoom, Google meet, WA chat, WA Video Call.

**Tabel 1 Tabel 1.10.4.1 Daftar Narasumber**

**Tabel 1.10.4.1 Daftar Narasumber**

informan	Position
Ririn Herini Evilistyani, S.IP, MM	Kepala Seksi Data dan Statistik
Alfian Subiantoro, S.PI	Staff Seksi Penelitian dan Pengembangan Statistik
Imam Karyadi Aryanto, S.IP. MPA	Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Galang Yunawan S.Si	Staf Seksi Data dan Statistik
Fatmah Budiani Arini, S,Si	Staf Seksi Data dan Statistik

RR Ukkhi Permanasari, ST	Staf Seksi Data dan Statistik
Mohamad Ridwan Santoso, S.Si.  MEng	Staf Seksi Data dan Statistik

#### 1.10.4.2 Dokumentasi

Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanto, Atmojo, (2020) dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti melalui peninggalan arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber tersebut harus terpercaya baik itu dari lembaga pemerintah maupun LSM. Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar ataupun foto yang berkaitan dengan sistem *e-government* pada aplikasi dataku serta dokumen-dokumen ataupun catatan yang ada di lokasi penelitian atau pada sumber-sumber lain terkait dengan objek penelitian.

#### 1.10.4.3 Ncapture

Data yang dikumpulkan melalui website atau media sosial seperti berita online yang kemudian disimpan dan di download menggunakan fitur *Ncapture* yang ada di aplikasi bawaan Nvivo yang berguna untuk mempermudah mendownload artikel yang berada di website atau media sosial.

### **1.10.5 Teknis analisis Data**

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data ini dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanto, Atmojo (2020) terdapat empat langkah penting dalam proses analisis data meliputi :

1. Pengumpulan data dan pengolahan data

Tahap pertama dalam analisis data setelah selesai pengumpulan data, baik dari studi wawancara dan dokumentasi adalah mengolah data sesuai dengan kebutuhan. Tahap ini perlu juga melibatkan proses penyalinan dari rekaman suara wawancara menjadi teks atau transkrip. Data-data yang sudah terkumpul, dipilih, dan dipilah berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

2. Seleksi Data

Seleksi data merupakan kegiatan memilih dan memilah data yang berguna dan relevan untuk dipakai dalam proses analisis, apakah data tersebut berupa data deskripsi atau data tabel, gambar, dan menyisihkan data-data yang dianggap kurang relevan.

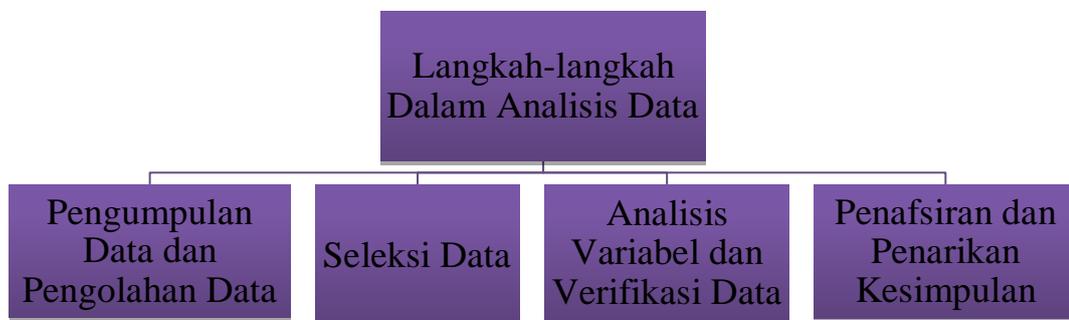
3. Analisis antar variabel dan verifikasi data

Disini melakukan usaha untuk mengaitkan temuan satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator yang lainnya.

4. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Penafsiran ini merupakan usaha yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Hasil penafsiran ini lah yang kemudian menjadi dasar untuk ditarik kesimpulan yang menjadi bab akhir dari rangkaian penelitian keseluruhan.

**Gambar 1.10.5** Langkah-langkah dalam analisis data



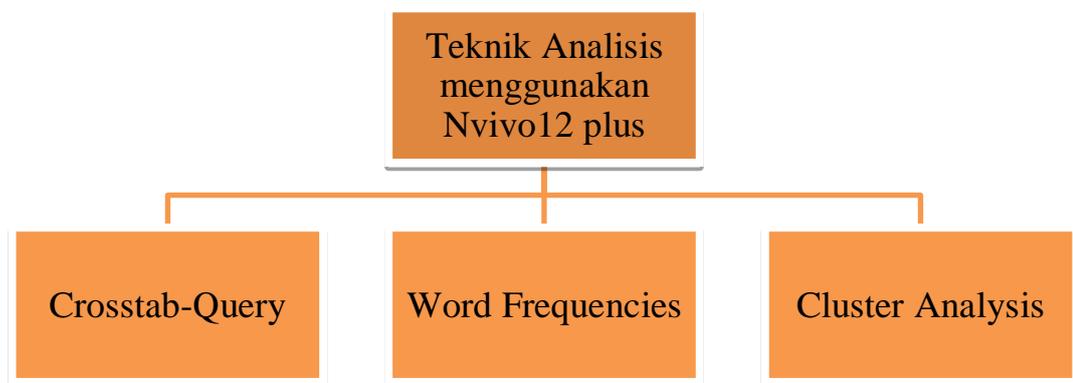
### 1.10.6 Alat Bantu Analisis Data Penelitian

Dalam melakukan analisis data dibantu dengan aplikasi berupa Nvivo 12 plus. Nvivo merupakan aplikasi yang membantu guna memisahkan data yang bersumber dari informan, peneliti, serta *secondary sources* (buku, laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen, sejarah, artikel-artikel jurnal, isi website, berita online, dan jurnal harian). Berikut beberapa fitur yang terdapat di aplikasi Nvivo 12 plus:

- a) *Crosstab-Query* yang berguna untuk memeriksa penyebaran pengkodean di seluruh kasus ataupun kasus tertentu. Selain itu Crosstab Query dapat menganalisa seberapa sering responden atau informan saat wawancara mengacu pada topik atau masalah tertentu.
- b) *Word Frequencies* merupakan analisis kata yang umum digunakan. Dengan mengecek jumlah kata pada hasil sumber penelitian guna mengetahui konsep yang sering muncul seperti mencari kata-kata yang sering digunakan dalam survei dataset atau melihat seberapa sering responden atau informan mengucapkan kata-kata, sehingga peneliti dapat memeriksa subjektivitas konten atau tidak dalam wawancara.
- c) *Cluster Analysis* merupakan teknik eksplorasi yang digunakan untuk memvisualisasikan pola dalam project. Dengan cara mengelompokkan sumber atau node yang

memiliki kata yang mirip, nilai atribut yang serupa, atau diberi kode yang serupa oleh node.

**Gambar 1.10.6.1** Teknik analisis data menggunakan Nvivo 12 plus



Selanjutnya alat bantu vosviewer yang berguna untuk menganalisis penelitian terdahulu dan melihat kebaruan atau novelty dari penelitian serta digunakan guna mengetahui konsep yang berkaitan dengan penelitian. Berikut fitur yang digunakan oleh alat bantu vosviewer :

- a) *Network Visulitation* : dalam visualisasi jaringan akan memperlihatkan jejaring antar ter yang divisualisasikan. Jarak antara dua jurnal dalam visualisasi menunjukkan keterkaitan jurnal dalam hal link co-sitasi. Umumnya dua jurnal yang lebih dekat akan semakin kuat keterkaitan mereka. Ko-sitasi terkuat link antar jurnal juga diwakili oleh garis.

- b) *Overlay visualitation* : disini overlay menggambarkan jejak history pada penelitian yang identik dengan visualisasi jaringan kecuali item itu berwarna berbeda.
- c) *Density Visualitation* : density disini menggambarkan penekanan atau kerapatan pada kelompok penelitian.

**Gambar 1.10.6.2** Teknis analisis menggunakan vosviewer

